

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

A.	Standar Pelayanan di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	1
1.	Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtangaan dan Pengelolaan Istana.....	1
a.	Biro Umum.....	1
	Standar Pelayanan Perencanaan Bangunan di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	1
b.	Biro Pelayanan Kerumahtangaan.....	6
	Standar Pelayanan Kegiatan Pelayanan Kerumahtangaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya.....	6
c.	Biro Istana-istana.....	13
1)	Standar Pelayanan Permohonan Izin Kunjungan Masyarakat ke Istana-istana Presiden di Daerah.....	13
2)	Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam Koleksi Rumah Tangga Kepresidenan.....	18
2.	Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol Pers dan Media.....	25
a.	Biro Protokol.....	25
1)	Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Presiden dan Istri/Suami Presiden	25
2)	Standar Pelayanan Penyiapan dan Pendistribusian Undangan Acara yang Dipimpin/Dihadiri oleh Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden.....	30
b.	Biro Pers dan Media.....	35
1)	Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya.....	35
2)	Standar Pelayanan Pemantauan dan Analisis Berita di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	41
c.	Biro Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pers dan Media.....	46
1)	Standar Pelayanan Dokumentasi Naskah, Foto, dan Audio Visual Kegiatan Presiden, dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	46
2)	Standar Pelayanan Sistem Informasi Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya.....	51
B.	Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.....	57
1.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.....	57
a.	Biro Hubungan Internasional.....	57
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hubungan Internasional.....	57
b.	Biro Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.....	63
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.....	63

c.	Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban.....	69
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban.....	69
d.	Biro Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.....	75
	Standar Pelayanan Pengolahan Data, Informasi, dan Laporan Masalah di Bidang Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia....	75
e.	Biro Kewilayahan dan Wawasan.....	81
	Standar Pelayanan Pengamatan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kewilayahan dan Wawasan.....	81
2.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi.....	87
a.	Biro Moneter dan Keuangan.....	87
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Keuangan Negara, Penanaman Modal, Badan-Badan Usaha, dan Perpajakan.....	87
b.	Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional.....	93
	Standar Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral pada Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional.....	93
c.	Biro Produksi.....	99
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Produksi.....	99
d.	Biro Prasarana Dasar dan Energi.....	105
	Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Prasarana Dasar, Perhubungan, Transportasi, Telekomunikasi, dan Energi.....	105
3.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	111
a.	Biro Agama dan Sosial.....	111
	Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama, Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana.....	111
b.	Biro Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga.....	117
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.....	117
c.	Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat.....	123
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat.....	123
d.	Biro Pemberdayaan Perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan.....	129
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bimbingan Anak, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan.....	129
4.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.....	135

a.	Biro Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	135
	Standar Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	135
b.	Biro Dukungan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara.....	141
	Standar Pelayanan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara.....	141
c.	Biro Pemantauan Pemberantasan Korupsi.....	147
	Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemantauan Pemberantasan Korupsi.....	147
d.	Biro Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat.....	153
	Standar Pelayanan Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat	153
5.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi.....	158
a.	Biro Protokol dan Persidangan.....	158
	1) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden	158
	2) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Daerah	163
	3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri.....	170
b.	Biro Umum.....	177
	1) Standar Pelayanan Pengelolaan Anggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	177
	2) Standar Pelayanan Penyiapan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	182
	3) Standar Pelayanan Penataan Lingkungan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.....	187
c.	Biro Tata Usaha.....	193
	Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Sistem Online)	193
d.	Biro Media Massa.....	199
	Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden serta Layanan Media Massa.....	199
e.	Biro Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.....	211
	Standar Pelayanan Urusan Perlengkapan, Bangunan dan Kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat, Istana dan Kediaman Resmi Wakil Presiden.....	211
f.	Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah.....	216
	1) Standar Pelayanan Penerjemahan Dokumen di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	216
	2) Standar Pelayanan Penghimpunan Notulensi Audiensi, Rapat, dan Kunjungan Kerja Wakil Presiden	220
	3) Standar Pelayanan Pendokumentasian Transkrip Naskah Pidato Wakil Presiden	224

C.	Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Militer.....	229
	a. Biro Administrasi TNI dan Polri.....	229
	1) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan TNI dan Polri.....	229
	2) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Golongan PATI/PAMEN TNI dan Polri.....	236
	3) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri.....	243
	b. Biro Operasi dan Pengamanan.....	250
	1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri.....	250
	2) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya ke Luar Negeri.....	256
	3) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Kunjungan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.....	262
	4) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Sandi dan Elektronika Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya.....	270
	5) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyiapan Sarana Angkutan Kunjungan Presiden, Wakil Presiden Beserta Keluarganya, serta Tamu Negara.....	277
	6) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Intelijen dalam Mendukung Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.....	285
	c. Biro Tanda-tanda Jasa/Kehormatan.....	292
	Standar Pelayanan Administrasi Penganugerahan Gelar dan Tanda Kehormatan.....	292
D.	Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara.....	303
	a. Biro Perencanaan.....	303
	1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategik Sekretariat Negara.....	303
	2) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	309
	3) Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja (Renja) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	315
	4) Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	320
	5) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	327

6) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Definitif Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	333
7) Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	339
8) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	345
9) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara.....	350
10) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara	356
11) Standar Pelayanan Penyusunan Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).....	361
12) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan Triwulanan).....	366
13) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	371
14) Standar Pelayanan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	375
15) Standar Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	381
b. Biro Keuangan.....	386
1) Standar Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bagi Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, dan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	386
2) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	391
3) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	396
4) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Duka Wafat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	401
5) Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus Pelayanan Tugas Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	406
6) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	411
7) Standar Pelayanan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	416
8) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	421

9) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Pemegang Uang Muka di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	426
10) Standar Pelayanan Penggantian Uang Persediaan pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007.01.....	431
11) Standar Pelayanan Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga pada Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 069.03.....	436
12) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Kerja pada Satuan Kerja Komisi Ombudsman Nasional.....	443
13) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium di Lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.....	448
14) Standar Pelayanan Pembayaran Insentif Pasukan Pengamanan Presiden pada Bagian Anggaran 069.03 Sekretariat Negara.....	454
15) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka di Lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara...	459
16) Standar Pelayanan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.....	465
17) Standar Pelayanan Penetapan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007 dan 069 Sekretariat Negara.....	471
18) Standar Pelayanan Penetapan Staf Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan dan tim Pemeriksa Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007.01 dan 069.03 Bagian Anggaran Pelaksana 007.01.....	478
19) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Audited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069.....	484
20) Standar Pelayanan Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sampai Dengan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	490
21) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan 069.03....	496
22) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Negara dan Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara	503
23) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069.....	511
24) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Perkembangan dan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Sekretariat Negara.....	518

c.	Biro Tata Usaha.....	524
1)	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Acara dan Pelaksanaan Keprotokolan Menteri Sekretaris Negara.....	524
2)	Standar Pelayanan Peminjaman Arsip di Lingkungan Sekretariat Negara	531
3)	Standar Pelayanan Pengkoordinasian, Pengendalian, dan Pengurusan Surat di Lingkungan Sekretariat Negara.....	536
4)	Standar Pelayanan Penyimpanan Arsip Inaktif di Lingkungan Sekretariat Negara	542
5)	Standar Pelayanan Reproduksi di Lingkungan Sekretariat Negara.....	548
d.	Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri.....	552
	Standar Pelayanan Administrasi Penugasan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Indonesia untuk Tugas Belajar dan Tugas Dinas Lainnya.....	552
e.	Biro Umum.....	563
1)	Standar Pelayanan Penanganan Perbaikan atau Pengembangan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Wisma serta Sarana dan Prasarana yang Berada dalam Penguasaan Sekretariat Negara.....	563
2)	Standar Pelayanan Penyediaan Jamuan Rapat Bagi Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara.....	569
3)	Standar Pelayanan Perawatan Kendaraan Dinas Sekretariat Negara.....	574
4)	Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Gedung Serbaguna, Ruang Rapat, dan Wisma Sekretariat Negara.....	579
5)	Standar Pelayanan Kesehatan Dasar di Lingkungan Sekretariat Negara.....	584
6)	Standar Pelayanan Bidang Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	591
E.	Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan.....	597
a.	Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri.....	597
	Standar Pelayanan Analisis Kebijakan Dalam Negeri.....	597
b.	Biro Dukungan Hubungan Internasional.....	603
	Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Hubungan Internasional	603
c.	Biro Naskah dan Penerjemahan.....	609
	Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Penarikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat dan Penerimaan Penempatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.....	609
d.	Biro Dukungan Informatika.....	617
1)	Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Otomasi Perkantoran Skala Kecil di Lingkungan Sekretariat Negara.....	617
2)	Standar Pelayanan Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara.....	624

3) Standar Pelayanan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara.....	630
4) Standar Pelayanan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara.....	635
5) Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan di Lingkungan Sekretariat Negara.....	640
6) Standar Pelayanan Penyediaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Sekretariat Negara.....	646
7) Standar Pelayanan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Sekretariat Negara	651
8) Standar Pelayanan Bantuan Teknis Pengoperasian Sistem di Sekretariat Negara.....	656
9) Standar Pelayanan Penyajian Data dan Informasi Hasil Pembangunan Nasional di Lingkungan Sekretariat Negara.....	660
F. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia.....	665
a. Biro Kepegawaian.....	665
1) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan Dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Negara.....	665
2) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.....	673
3) Standar Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara	684
4) Standar Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara	693
5) Standar Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara.....	700
6) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya.....	715
b. Biro Organisasi dan Humas.....	727
1) Standar Pelayanan Pengusulan dan Evaluasi Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara.....	727
2) Standar Pelayanan Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara.....	734
3) Standar Pelayanan Pemberian Informasi Kegiatan melalui Peliputan dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Negara...	740
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.....	745
1) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Sekretariat Negara	745
2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Negara.....	755
3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Sekretariat Negara	770
G. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan.....	781
a. Biro Hubungan Lembaga Negara.....	781

1)	Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara.....	781
2)	Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Rapat Kerja, Rapat Pembahasan Anggaran Sekretariat Negara, dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang antara Mensesneg dengan DPR	788
3)	Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Negara, Komisi dan Dewan Nasional.....	795
b.	Biro Hubungan Lembaga Daerah.....	800
1)	Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga-Lembaga Daerah.....	800
2)	Standar Pelayanan Penyiapan Saran dan Masukan Tentang Lembaga Daerah.....	805
c.	Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	810
1)	Standar Pelayanan Penyiapan Saran dan Masukan Tentang Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	810
2)	Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	815
d.	Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.....	821
	Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.....	821
H.	Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.....	826
a.	Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.....	826
1)	Standar Pelayanan Analisis Penyiapan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha, Sumber Daya Alam, Prasarana dan Lingkungan Hidup	826
2)	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	833
3)	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	847
4)	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	856
5)	Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	868
6)	Standar Pelayanan Analisis dan Penyiapan Pertimbangan Menteri Sekretaris Negara atas Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	880
b.	Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	885

1) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	885
2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	895
3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	913
4) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	921
5) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	930
c. Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan.....	936
1) Standar Pelayanan Pendokumentasian dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangannya.....	936
2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan Dengan Perkara/ Gugatan.....	941
3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan Dengan Pengaduan Masyarakat.....	950
I. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan.....	955
a. Biro Pengawasan Internal.....	955
Standar Pelayanan Audit Kinerja (Operasional) Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Negara.....	955
b. Biro Akuntabilitas Kinerja.....	963
1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Sekretariat Negara.....	963
2) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Negara.....	970
3) Standar Pelayanan Riviur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Diterima Presiden Melalui Menteri Sekretaris Negara.....	977
4) Standar Pelayanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara.....	983
c. Biro Pengaduan Masyarakat.....	992
Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Negara.....	992